

Pidato Duta Besar Dr. N. van Dam
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)
Tema: Islam dan Demokrasi
28 November 2008

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang terhormat Presidium KAHMI dan Staf Khusus Wakil Presiden RI, Bapak Tubagus Farikh

Yang terhormat Moderator dan Mantan Dubes Indonesia untuk Libya Bapak Nawawi Hasbi.

dan saudara-saudara anggota KAHMI yang berbahagia.

Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya berbicara dalam forum penting ini yang diselenggarakan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia. Saya merasa mendapat kehormatan karena diundang berbicara dan karena diminta menyumbang pikiran atas topik hari ini ‘Islam dan Demokrasi’.

Islam

Perkenankanlah saya memulai dengan bagian pertama tema hari ini yaitu ‘Islam’.

Seperti yang Anda ketahui, Islam sedang menjadi topik hangat. Banyak orang yang membicarakannya tetapi sedikit yang memiliki pengetahuan memadai tentang topik ini. Jika orang hendak mengadakan seminar tentang “Demokrasi di Asia Tenggara” misalnya mungkin agak sulit untuk mendapatkan sponsor dana. Tetapi jika ditambahkan kata “Islam” sehingga topik seminar menjadi peranan demokrasi dan Islam di Asia Tenggara maka kemungkinan akan mendapatkan dana tambahan yang besar.

Tetapi di luar masalah praktis organisasi itu, hari ini saya ingin bertanya kepada Anda : Apakah debat ini sungguh-sungguh mengenai Islam dan Demokrasi ataukah kita seharusnya membahas Demokrasi dalam aneka konteks sosial & budaya saja?

Seperti yang diketahui secara umum, Indonesia adalah negara demokrasi berpenduduk Muslim yang terbesar di dunia. Dari 240 juta orang penduduk Indonesia sekitar 90% adalah pemeluk agama Islam. Tetapi bersamaan dengan itu Indonesia merupakan negara sekuler, yang mengakomodasikan agama-agama besar yang lain seperti Agama Buddha, Hindu dan Kristen.

Jika Indonesia mencari pijakan bersama ini akan dicari dalam kelima prinsip Pancasila: keTuhanan, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini bukanlah prinsip yang hanya khas Islam. Unsur-unsur pengikat sosial dan budaya ini terdapat pada semua agama besar di Indonesia. Dan yang paling penting: masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan berpegang pada Pancasila sebagai patok rujukan bagi demokrasi Indonesia.

Demokrasi

Dengan demikian kita sampai kepada bagian kedua topik hari ini: demokrasi. Demokrasi tidak lebih daripada sebuah sistem untuk mengelola dan mengatur aspirasi politik penduduk suatu daerah tertentu. Sistem ini didasarkan pada seperangkat nilai dan persetujuan. Di Indonesia nilai bersama ini ditemukan dalam Pancasila.

Indonesia telah menjalankan demokrasi sejak tahun 1998 dan kini, sama seperti Belanda, telah tumbuh menjadi demokrasi terkembang penuh, dengan pers yang bebas, debat politik yang bergairah dan sekian banyak partai politik (ada yang bilang terlalu banyak)

Tetapi tentu saja demokrasi itu bukan tujuan akhir melainkan sebuah proses. Mutu debat politik harus dijaga terus-menerus dan peran-serta semua anggota masyarakat dalam proses demokrasi dan pemilihan harus terus ditingkatkan. Sebagai contoh, di Negeri Belanda ada kecenderungan untuk menganggap demokrasi sebagai suatu kewajiban, sesuatu yang alami. Yang menjadi tantangan bagi kami adalah meyakinkan masyarakat umum bahwa meskipun demokrasi bukan suatu sistem yang sempurna, demokrasi merupakan pilihan yang paling mending dari semua sistem politik yang ada.

Islam dan Demokrasi

Kembali ke topik utama ceramah hari ini, 'Islam dan Demokrasi', menurut saya Indonesia telah berhasil membuktikan bahwa kedua istilah populer ini dapat dikombinasikan. Indonesia memisahkan negara dan agama, sama juga di Negeri Belanda. Orang-orang di sini adalah orang Jawa, orang Batak tetapi bersamaan itu juga penganut Islam atau penganut Kristen atau pengikut Buddha. Indonesia berhasil mencapai keseimbangan dalam keanekaragaman ini. Indonesia menjadi negara sekuler di mana mayoritas penduduk sungguh-sungguh menghayati kepercayaan agamanya masing-masing.

Dengan demikian kita sampai kembali pada pernyataan saya yang sebelumnya, yaitu bahwa konteks sosial dan budaya sama pentingnya dalam usaha memahami berbagai versi demokrasi yang berbeda. Indonesia adalah contoh sebaik-baiknya dari negara non-Barat yang melaksanakan demokrasi versi sendiri sambil menghormati nilai-nilai utama yang tercakup dalam Pancasila serta tidak melupakan bahwa mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Karena itu menggabungkan istilah Islam dan Demokrasi tidak akan membantu kita untuk memahami baik Demokrasi ataupun Islam dengan lebih bagus, karena

ini seolah-olah menyarankan bahwa kedua hal itu tidak dapat berjalan bersama-sama secara wajar.

Saya pribadi berpikir bahwa lebih berguna untuk berusaha memahami negara-negara dalam konteksnya masing-masing dan membandingkannya dengan pengalaman negeri sendiri. Mari kita lihat kedua negara kita, Indonesia dan Negeri Belanda.

Hubungan bilateral kita.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi ada juga banyak yang beragama lain – terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan dengan jumlah penduduk lebih dari 235 juta jiwa. Negeri Belanda adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Kristen – tetapi memiliki minoritas Muslim yang lumayan besar – dan penduduknya hanya 16 juta orang.

Meskipun begitu banyak perbedaannya dan meskipun ada orang-orang yang mengatakan bahwa dunia sedang mengalami apa yang disebut ‘benturan kebudayaan’ hubungan bilateral antara Indonesia dan Negeri Belanda belum pernah sebaik seperti pada saat sekarang ini!

Tentu saja kita semua sadar akan masa lalu kita dan kita memang tak boleh melupakannya. Tetapi setelah mantan menteri luar negeri, Dr. Bot menghadiri perayaan 17 Agustus pada tahun 2005 dan atas nama pemerintah Negeri Belanda menyatakan fakta bahwa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kedua negara kita memutuskan bahwa telah tiba saatnya untuk membuka lembaran baru dan bersama-sama menyongsong masa depan.

Untuk meresmikan hubungan baru itu, kita sekarang sedang bersiap-siap untuk apa yang disebut *Comprehensive Partnership* antara Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Belanda yang harus ditandatangani secepat mungkin. Namun kerja sama kita tidak perlu menunggu; meningkatkan hubungan dan saling mendukung di bidang kerja sama ekonomi, politik dan budaya dan memberi dukungan bagi sekian banyak hubungan perorangan antar warga di ke dua negara kita telah menjadi pekerjaan sehari-hari.

Izinkanlah saya memberikan beberapa contoh lagi:

Pemerintah Belanda telah memutuskan untuk mengalokasikan rata-rata €100 juta setahun (Rp 1,3 trilyun) sebagai bantuan hibah (jadi bukan pinjaman) untuk program-program kerja sama pembangunan dengan Indonesia dalam tahun-tahun mendatang. Dengan ini Negeri Belanda menjadi salah satu donor bilateral yang terbesar di Indonesia). Secara konkret kerja sama kami diarahkan pada lima bidang: tata kelola pemerintahan yang baik, perbaikan iklim investasi, sektor pengairan, pendidikan dan lingkungan hidup.

Di bidang pengairan kita bekerja sama pada pencegahan banjir (flood control), irigasi dan air bersih - sanitasi. Ada juga beberapa perusahaan air minum Belanda yang aktif di sini dalam merenovasi penyediaan air bersih perkotaan – sebagian dengan bantuan pemerintah Belanda.

Selanjutnya pula usaha kami ditujukan pada peningkatan akses kepada pendidikan dan perbaikan mutu pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Ini malah merupakan program kami yang terbesar yang dalam setahun menghabiskan Rp. 400 milyar. Di samping itu Belanda setiap tahun menyediakan lebih dari 200 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang akan belajar di Negeri Belanda. Di samping itu ada bantuan bagi pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas di bidang air bersih dan sanitasi. Untuk

beasiswa-beasiswa ini ada bimbingan khusus bagi mahasiswa dari daerah tertinggal; antara lain dengan kursus bahasa Inggris.

Dan juga kita sedang mempersiapkan program pelestarian lingkungan agar lingkungan hidup dapat dipertahankan demi generasi Indonesia yang akan datang. Dalam hal ini yang diutamakan adalah pengelolaan tanah gambut yang lebih baik dan pengembangan sumber energi yang berkelanjutan seperti energi hidro dan energi panas bumi.

Kunjungan

Pada akhirnya ingin pula saya garis bawahi banyaknya saling kunjungan antara kedua negara kita. Anggota-anggota DPR, menteri, mahasiswa dan pemuka agama dari Indonesia sering melakukan kunjungan ke Belanda. Dari Belanda pun banyak anggota Parlemen, cendekiawan, pengusaha dan menteri berkunjung ke Indonesia.

Belum lama ini menteri urusan ekonomi kami Ms. Van der Hoeven mengunjungi Jakarta dan Surabaya dengan membawa delegasi bisnis yang mewakili 35 perusahaan dengan tujuan mencari peluang investasi di Indonesia.

Negeri Belanda saat ini ada di urutan ke-7 di antara investor besar di Indonesia dan kami berharap agar skor ini masih dapat ditingkatkan! Untuk tahun depan kami akan menyambut Menteri Urusan Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Sekretaris Negara untuk Pertahanan dan Sekretaris Negara Pengelolaan Perairan yang datang ke Indonesia. Dan, tentu saja, kami mengharapkan pula agar Presiden Yudhoyono berkesempatan mengunjungi Negeri Belanda.

Penutup

Dengan demikian saya telah sampai pada akhir ulasan saya ini. Saya berpendapat bahwa baik Islam maupun Demokrasi adalah topik yang penting dan kedua-duanya sangat relevan bagi Indonesia dan bagi Negeri Belanda. Islam dan demokrasi tidak saling menolak; Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa keduanya itu dapat bergandengan.

Saya juga senang karena dapat menyimpulkan bahwa Indonesia dan Negeri Belanda menunjukkan kepada dunia bahwa benturan kebudayaan tidak perlu terjadi. Hubungan kami sangat baik, malah semakin hari semakin baik. Kami akan tetap membina hubungan ini dan berinvestasi di Indonesia sambil menyongsong kebersamaan di masa yang akan datang.

Terima kasih.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

+++++